

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara dengan informan, observasi, dokumentasi serta analisisnya mengenai kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami dengan melihat kepada teori *Organizational Capacity* (Kapasitas Organisasi) yang dikemukakan oleh Horton (2003) yang mengacu kepada 2 (dua) area kapasitas yaitu kapasitas sumber daya (*resources*) dan kapasitas manajemen. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis dalam indikator kapasitas organisasi pada BPBD Kepulauan Mentawai.

Pertama, pada kapasitas sumber daya BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dilihat dari indikator sumber daya manusianya, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai masih lemah dalam perencanaan pengembangan pegawai. Ini terlihat dari proses rekrutmen dan pelaksanaan pelatihan yang masih belum cukup untuk mengembangkan kemampuan pegawai. Pegawai yang direkrut, terutamanya dalam hal ini pegawai kontrak dirasa bekerja belum sesuai dengan bidang keahlian. Hal ini dapat

dilihat dari proses rekrutmen pegawai kontrak yang tidak memprioritaskan kompetensi akademik dari calon yang diinginkan. Horton (2003) menyiratkan bahwa ketika pegawai tidak dipekerjakan sesuai dengan bidang keahlian mereka, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan pegawai dalam merefleksikan, belajar, dan berinovasi. Hal ini dikhawatirkan akan berakibat pada produktivitas pegawai yang selanjutnya akan berimplikasi kepada buruknya kinerja BPBD secara keseluruhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selanjutnya pelatihan yang dilakukan dinilai masih kurang. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai masih membutuhkan banyak pelatihan-pelatihan terutama hal-hal yang terkait teknis dan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana karena pegawai BPBD akan lebih banyak bekerja di lapangan yang sangat membutuhkan pelatihan tersebut. Secara umum, sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan dimana organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dengan mengacu pada hal-hal seperti jumlah atau kuantitas pegawai, kemampuan pegawai, serta proses rekrutmennya.

Dari segi infrastruktur dapat disimpulkan bahwa infrastruktur dan teknologi yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah bagus. Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya kondisi infrastruktur dan teknologi yang digunakan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai namun yang menjadi hambatannya adalah infrastruktur dan teknologi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena

daerah yang terisolir dan jaringan komunikasi yang sulit diakses. Kemudian mengenai sumber daya finansial, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi keuangan baik itu Kepulauan Mentawai secara umum maupun BPBD Kepulauan Mentawai secara khusus sebagai yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan masih belum cukup. Artinya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kepulauan Mentawai masih terkendala masalah keterbatasan anggaran. Ini dapat dilihat dari tidak terlaksananya beberapa program. Kapasitas sumber daya finansial BPBD Kepulauan Mentawai belum maksimal dalam mendukung kegiatan penanggulangan risiko bencana.

Kedua, pada kapasitas manajemen yang dilihat dari indikator kepemimpinan strategis, manajemen proses dan program, serta hubungan dan jaringan secara umum sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada kendala. Secara umum kepemimpinan di BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa dibilang baik. Ini terlihat dari bagaimana cara pemimpin menetapkan arah, mempengaruhi dan menyelaraskan para pegawai lainnya untuk sama-sama bekerja mencapai tujuan bersama, memotivasi mereka dan membangun komitmen mereka untuk bertindak dan bertanggung jawab pada kinerja.

Kemudian pada indikator manajemen program dan proses ini, peneliti menilai BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sangat baik menyusun secara detail tentang perencanaan-perencanaan yang akan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana. hal ini terbukti dengan ada disusunnya dokumen Rencana Penanggulangan

Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di dalamnya sudah menjeleaskan semua yang terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana, dimulai dari pengkajian sejauh mana potensi ancaman bencana yang mungkin akan dihadapi oleh Kepulauan Mentawai, kemudian penetapan program prioritas penanggulangan dan bagaimana pelaksanaan aksi penanggulangan bencana di lapangan. Selain itu juga dijelaskan secara detail tentang penganggaran bencana dan bagaimana keterlibatan instansi lain serta apa tugasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kepulauan Mentawai. Walaupun terkadang dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, masih terkendala oleh ketersediaan anggaran yang belum memadai dalam melaksanakan program-program penanggulangan bencana tersebut.

Kemudian mengenai hubungan dan jaringan, Peneliti menilai BPBD sudah cukup baik memelihara hubungan organisasi dengan organisasi lain. BPBD Kepulauan Mentawai selalu berusaha melibatkan *stakeholders* dalam kegiatan penanggulangan bencana walaupun terkadang dalam pelaksanaan terkadang terjadi hambatan terutama komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD mampu menilai mitra potensial terutamanya pihak swasta dan Non-Governmental Organization (NGO) yang mana hubungan tersebut nanti bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan bencana, terutamanya yaitu dari segi sumber daya manusia dan anggaran.

6.2 Saran

Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami, peneliti memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten secara khususnya harus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar daerah agar bisa memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
2. Perlu adanya penambahan dan peningkatan infrastruktur yang dimiliki BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyesuaikan dengan kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang sangat luas dan tersebar di beberapa pulau.
3. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu mempertimbangkan mendirikan kantor pembantu/pos beserta gudang logistik BPBD di setiap pulau-pulau utama di Kepulauan Mentawai mengingat luasnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan begitu BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menjangkau setiap pelosok daerah sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana bisa berjalan efektif dan efisien.
4. Perlu adanya usaha peningkatan dan pengembangan hubungan antara BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama hubungan dengan NGO

dan swasta untuk mengatasi kelemahan BPBD dalam sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Khusus dalam hal keuangan, BPBD tidak bisa hanya bergantung kepada sumber daya finansial pemerintah saja baik itu pemerintah daerah maupun pusat, mengingat sumber daya finansial pemerintah sendiri juga masih terbatas dalam membiayai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

